

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN DARI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN NILAI PANCASILA SILA PERTAMA

Lusi Betricia Sinaga¹, Rahel Purba², Sarveli Manurung³, Nasirwan⁴

Universitas Negeri Medan

e-mail: lucia031129@gmail.com¹, rahelpurba90@gmail.com², sarvelim@gmail.com³,
nasirwan@unimed.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila dalam praktik akuntansi keuangan daerah. Dalam konteks tata kelola keuangan publik, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai sistem informasi, melainkan juga sebagai alat kontrol moral. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji dimensi etis dan spiritual dalam pengelolaan keuangan daerah serta peran aparatur sipil negara (ASN) dalam mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan ke dalam sistem akuntansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip Ketuhanan dapat memperkuat integritas, menolak korupsi, dan menjaga amanah dalam pengelolaan dana publik. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan seperti budaya birokrasi yang sekular dan lemahnya pendidikan etika. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyatukan nilai religius, etika, dan profesionalisme dalam tata kelola keuangan daerah agar tercipta sistem yang adil, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: BUMD, Nilai Ketuhanan, Akuntansi Keuangan Daerah, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Etika, ASN.

Abstract – This study aims to explore the application of the value of "Belief in One God" as the first principle of Pancasila in the practice of regional financial accounting. In the context of public financial governance, accounting serves not only as an information system but also as a tool for moral control. Adopting a descriptive qualitative approach based on a literature review, this research investigates the ethical and spiritual dimensions of regional financial management and the role of civil servants (ASN) in integrating the value of "Belief in One God" into the accounting system. The analysis indicates that the implementation of this principle can strengthen integrity, prevent corruption, and uphold trust in the management of public funds. However, significant challenges remain, including a secular bureaucratic culture and insufficient ethical education. Therefore, an approach is required that combines religious values, ethics, and professionalism in regional financial governance to create a fair, transparent, and accountable system.

Keywords: Regional Financial Accounting, Pancasila, Belief In One God, Ethics, Civil Servants.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka otonomi daerah, desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan mereka secara mandiri. Salah satu instrumen penting dalam proses ini adalah akuntansi keuangan daerah, yang berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan kepada berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, legislatif daerah, hingga masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Akuntansi keuangan daerah bukan hanya berperan sebagai sistem informasi, tetapi juga sebagai cerminan dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntansi yang baik dapat memperkuat akuntabilitas publik melalui penyajian laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik akuntansi keuangan daerah masih kerap dipahami secara sempit—sekadar rutinitas administratif yang berfokus pada pemenuhan kewajiban pelaporan. Proses penyusunan laporan keuangan sering kali lebih diarahkan untuk memenuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku, tanpa diimbangi dengan nilai-nilai etika dan integritas yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pengelolaan uang

rakyat. Ketika akuntansi direduksi menjadi kegiatan teknis semata, maka tujuan besar dari pengelolaan keuangan publik—yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata—berisiko terabaikan. Lebih jauh lagi, lemahnya dimensi etis dalam praktik akuntansi membuka celah bagi penyimpangan, seperti manipulasi laporan keuangan, penganggaran yang tidak berpihak pada kepentingan publik, serta korupsi yang terstruktur.

Di sinilah pentingnya menempatkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai dasar etika dalam manajemen keuangan daerah. Sila ini tidak hanya merupakan pengakuan formal terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga menjadi landasan moral bahwa setiap tindakan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan rasa takut akan pengawasan Tuhan. Dalam perspektif ini, akuntansi bukan lagi sekadar alat pencatat transaksi, melainkan juga wahana pembentukan karakter dan integritas aparatur pemerintah. Nilai Ketuhanan menjadi pengingat bahwa setiap rupiah yang dikelola memiliki dimensi amanah, bukan hanya kepada masyarakat sebagai pemberi mandat, tetapi juga kepada Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi.

Pendekatan ini menantang paradigma lama yang menempatkan akuntansi dalam ruang yang steril dari nilai-nilai spiritual. Sebagai mahasiswa akuntansi yang sedang berada di tahap akhir pembelajaran, penting untuk mulai memandang akuntansi tidak hanya dari sisi teknis dan normatif, tetapi juga dari sisi etis dan filosofis. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pembangunan sistem pemerintahan yang bersih dan bermartabat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diintegrasikan secara substantif dalam praktik akuntansi keuangan daerah. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga untuk membangun sistem keuangan publik yang etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam bagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam praktik akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini bersifat teoritis dan konseptual, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung, melainkan sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang relevan dan valid.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan). Data tersebut meliputi berbagai dokumen resmi, seperti laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan secara terbuka, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan (SAP), serta dokumen-dokumen kebijakan lainnya yang relevan. Selain itu, digunakan pula berbagai literatur akademik, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang membahas etika, akuntansi sektor publik, dan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang sistematis, baik secara fisik di perpustakaan maupun secara digital melalui repositori ilmiah, situs resmi pemerintah, serta jurnal nasional yang terakreditasi. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan memperhatikan relevansi, kredibilitas sumber, dan kesesuaian dengan topik penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji isi dari dokumen yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan, etika publik, dan praktik akuntansi keuangan daerah. Proses analisis dilakukan melalui tahap-tahap reduksi data, kategorisasi tematik, dan

interpretasi makna. Fokus utama analisis diarahkan pada bagaimana nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam kebijakan akuntansi, regulasi keuangan, dan narasi etika dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan dimensi etika dan spiritual dalam sistem akuntansi sektor publik. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan akademisi dalam merumuskan pendekatan pengelolaan keuangan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bermoral dan berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat konseptual, tidak bertujuan menguji hipotesis kuantitatif, melainkan mengeksplorasi pemikiran kritis terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan relevansinya dalam praktik akuntansi keuangan daerah.

Sebagai studi pustaka, pendekatan ini memanfaatkan sumber data sekunder yang terdiri dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah daerah, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema nilai Pancasila, etika publik, dan tata kelola keuangan daerah. Data dianalisis secara sistematis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola naratif dan makna substantif terkait integrasi nilai spiritual dalam akuntansi publik.

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa isu etika dan nilai Ketuhanan tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu diuraikan secara naratif, interpretatif, dan reflektif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk menjangkau dimensi filosofis yang seringkali terabaikan dalam pendekatan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntansi Keuangan Daerah: Antara Tanggung Jawab Teknis dan Moral

Akuntansi keuangan daerah pada hakikatnya merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan aktivitas keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sistem ini tidak hanya memenuhi aspek administratif dan yuridis, tetapi juga menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas kepada publik sebagai pemilik sejati anggaran. Dalam kerangka negara Pancasila, akuntansi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa, salah satunya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendekatan teknokratis yang selama ini mendominasi praktik akuntansi keuangan daerah seringkali membuat aspek nilai dan etika termarginalkan. Padahal, dalam penyelenggaraan keuangan daerah, nilai spiritualitas dan kesadaran moral sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, manipulasi data, serta praktik koruptif. Oleh karena itu, sudah saatnya paradigma akuntansi keuangan daerah diperluas, dari sekadar fungsi administratif menjadi sistem yang menginternalisasi nilai-nilai etis dan religius.

2. Penerapan Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Akuntansi Keuangan Daerah

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan atas setiap perbuatannya. Dalam praktik akuntansi keuangan daerah, nilai ini dapat diartikulasikan dalam beberapa prinsip, antara lain:

- Integritas dan Kejujuran: ASN yang menangani keuangan daerah harus mengedepankan kebenaran dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Integritas menjadi benteng utama dari penyimpangan data, penggelembungan anggaran, maupun rekayasa belanja modal.
- Penolakan terhadap Korupsi: Prinsip Ketuhanan secara implisit menolak segala bentuk korupsi karena merugikan hak masyarakat dan mencederai keadilan sosial. ASN yang

beriman seharusnya memiliki kesadaran spiritual bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan dosa di hadapan Tuhan.

- Menjaga Amanah Publik: Pengelolaan keuangan daerah adalah amanah besar yang harus dijaga. Dana publik bukanlah milik pribadi atau kelompok, tetapi milik masyarakat luas. Prinsip amanah dalam ajaran Ketuhanan mendorong ASN untuk menggunakan dana publik secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penerapan nilai Ketuhanan ini tidak hanya bersifat simbolik atau formalitas dalam dokumen visi-misi, tetapi harus diimplementasikan dalam budaya kerja dan pengambilan keputusan keuangan.

3. Tantangan dalam Penerapan Nilai-Nilai Moral dalam Manajemen Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki peran sentral dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola publik, serta menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Nasirwan (2024), kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, seperti kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Temuan-temuan tersebut juga selaras dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya penggabungan pelatihan yang efektif serta sosialisasi standar akuntansi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik.

Meskipun demikian, selain faktor-faktor teknis tersebut, integrasi nilai-nilai moral dan spiritual tetap menjadi elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut di lapangan seringkali menemui berbagai tantangan, antara lain:

- Budaya Organisasi yang Sekular dan Transaksional: Banyak birokrasi daerah yang masih melihat akuntansi sebagai alat pelaporan mekanistik semata. Nilai-nilai etika dianggap sebagai urusan pribadi, bukan bagian dari sistem kerja.
- Minimnya Keteladanan Pimpinan: Nilai tidak bisa hanya diajarkan, tetapi harus dicontohkan. Ketika pejabat publik menunjukkan perilaku permisif terhadap korupsi atau manipulasi laporan, maka akan sulit membangun budaya etis di level ASN bawahan.
- Tekanan Politik dan Konflik Kepentingan: ASN dihadapkan pada situasi dilematis saat harus memilih antara kebenaran dan tekanan dari elite politik atau atasan. Hal ini membuat prinsip moral sulit dijalankan secara konsisten.
- Keterbatasan Pendidikan Etika di Lembaga Pendidikan: Kurikulum akuntansi di banyak institusi pendidikan tinggi masih menempatkan etika sebagai pelengkap, bukan sebagai substansi utama. Akibatnya, lulusan tidak terbiasa melihat akuntansi sebagai praktik moral.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada pendekatan transformatif yang menjadikan nilai Ketuhanan sebagai dasar dalam pembentukan sistem pengendalian internal, pelatihan ASN, hingga sistem penilaian kinerja yang tidak hanya berbasis output tetapi juga nilai.

4. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelaku Moral dalam Akuntansi Daerah

ASN adalah garda terdepan dalam pengelolaan akuntansi keuangan daerah. Tugas mereka bukan hanya menjalankan prosedur teknis, tetapi juga menjadi penjaga moral dari sistem keuangan publik. Dalam konteks nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, peran ASN dapat dikembangkan dalam beberapa dimensi:

- Sebagai Penanggung Jawab Moral (Moral Agent): ASN harus sadar bahwa setiap angka yang mereka tulis atau input dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi moral. Keputusan fiskal yang tidak adil dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan pelanggaran hak masyarakat.
- Sebagai Pendidik Sosial (Moral Educator): ASN senior memiliki tanggung jawab untuk menularkan nilai-nilai etis kepada ASN muda melalui keteladanan dan mentoring yang

berlandaskan nilai Pancasila.

- Sebagai Pelindung Kepentingan Publik (Public Steward): ASN harus berperan sebagai pelindung dana publik dari potensi penyalahgunaan, serta berani bersikap apabila menemukan ketidaksesuaian dalam praktik pelaporan dan penggunaan anggaran.

Dengan membumikan nilai Ketuhanan dalam keseharian ASN, akuntansi keuangan daerah akan berkembang menjadi sistem yang tidak hanya akuntabel secara teknis, tetapi juga bermartabat secara moral.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi keuangan daerah tidak hanya merupakan sistem informasi keuangan, tetapi juga instrumen moral yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila ke dalam sistem akuntansi publik dapat menjadi fondasi untuk membangun manajemen keuangan yang lebih beretika, bertanggung jawab, dan antikorupsi.

Prinsip Ketuhanan, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual, mendorong ASN untuk melihat pengelolaan dana publik bukan sekadar sebagai tugas administratif, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan transendental. Namun, tantangan penerapannya masih besar, seperti budaya birokrasi yang sekuler, lemahnya keteladanan pimpinan, hingga tekanan politik yang dapat melemahkan komitmen etis ASN.

Peran ASN sangat penting sebagai pelaku moral (moral agent), pendidik etika (moral educator), dan pelindung kepentingan publik (public steward). Untuk itu, dibutuhkan pendekatan transformatif yang menyatukan dimensi teknis, etis, dan spiritual dalam kurikulum pendidikan akuntansi, pelatihan ASN, serta sistem kontrol dan evaluasi kinerja birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2020). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Arifin, Z. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Kebijakan Publik*, 10(2), 145–160.
- Putri, R. A., & Haryono, T. (2020). Etika Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Pemerintah Kota X. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah*, 5(1), 23–35.
- Nasirwan, Lubis, A. Z. Y., Bhayangkara, A., & Sitanggang, E. M. S. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan: Studi kasus pada BKAD Provinsi Sumatera Utara. *As-Syirkah: Islamic Economics Financial Journal*, 3(3), 1-15.